



## KONSEP KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM HADIS UMMUL HADIS: ANALISIS NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN NABI

**Fahril Hendrawan<sup>a\*</sup>, Sri Mawaddah, M.A<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, [fahrilhendra865@gmail.com](mailto:fahrilhendra865@gmail.com),  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>b</sup> Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, [rhiema79@yahoo.com](mailto:rhiema79@yahoo.com),  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

\* Korespondensi

### ABSTRACT

*Political leadership in Islam is closely related to the exemplary behavior of the Prophet Muhammad SAW, who was not only a messenger of revelation, but also a leader of the people in all aspects of life, including politics. The Hadith of Ummul Hadith, namely the hadith "Indeed all deeds depend on the intention ..." is an important foundation in forming leadership values that are oriented towards integrity and noble goals. This article aims to examine the concept of the Prophet's political leadership through an analysis of the values in the Hadith of Ummul Hadith and their correlation with the Prophet's leadership practices in the context of statehood. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to the hadith literature and the history of prophecy. The results show that the leadership of the Prophet Muhammad SAW is based on the values of sincere intention (ikhlasiyah), responsibility (mas'uliyah), justice ('adalah), and exemplary (uswah hasanah) which can be used as guidelines in forming ethical political leadership that is oriented towards the welfare of the people.*

**Keywords:** *political leadership, Hadith of Ummul Hadith, Prophet Muhammad SAW, leadership values, sincerity, justice.*

### Abstrak

Kepemimpinan politik dalam Islam sangat erat kaitannya dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi juga pemimpin umat dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Hadis Ummul Hadis, yakni hadis "Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya..." menjadi pondasi penting dalam membentuk nilai-nilai kepemimpinan yang berorientasi pada integritas dan tujuan luhur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemimpinan politik Nabi melalui analisis terhadap nilai-nilai dalam hadis Ummul Hadis dan korelasinya dengan praktik kepemimpinan Nabi dalam konteks kenegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur hadis dan sejarah kenabian. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berpijak pada nilai niat yang ikhlas (ikhlasiyah), tanggung jawab (mas'uliyah), keadilan ('adalah), dan keteladanan (uswah hasanah) yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk kepemimpinan politik yang etis dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** kepemimpinan politik, hadis Ummul Hadis, Nabi Muhammad SAW, nilai kepemimpinan, ikhlas, keadilan.

### 1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan politik dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai struktur kekuasaan formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang bersumber dari wahyu. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara,

komandan militer, hakim, dan pendidik umat. Peran multifaset ini menjadikan kepemimpinan beliau sebagai model ideal yang menyatukan dimensi profetik dan politik secara harmonis (Wahdah, 2023).

Salah satu hadis yang memiliki posisi sentral dalam menggambarkan fondasi moral Islam adalah hadis Ummul Hadis, yang berbunyi: “*Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan.*” Hadis ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sering dijadikan rujukan utama dalam kajian fikih dan ibadah. Namun, makna mendalam dari hadis ini juga mencakup aspek kepemimpinan politik, di mana niat yang ikhlas dan orientasi kepemimpinan yang berangkat dari motivasi ruhaniyah menjadi pondasi utama dalam kepemimpinan Nabi.

Dalam konteks ilmu politik, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan musyawarah. Piagam Madinah, sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, menunjukkan bagaimana Nabi mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam membangun masyarakat pluralistik yang adil dan beradab.

Hadis-hadis lain juga menekankan pentingnya sifat adil dalam kepemimpinan. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي يَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ

Artinya: “*Ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah, pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah: Imam (pemimpin) yang adil...*” . Keadilan ini tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam memperlakukan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, kepemimpinan Nabi juga ditandai dengan sikap empati dan kepedulian terhadap umatnya. Beliau dijuluki sebagai rahmatan lil ‘alamin, menunjukkan keprihatinan dan kasih sayang yang mendalam terhadap umat manusia. Sikap ini tercermin dalam berbagai keputusan politik dan sosial yang beliau ambil selama memimpin.

Dalam era politik digital saat ini, nilai-nilai kepemimpinan Nabi tetap relevan. Pemimpin di era modern dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan integritas, keadilan, dan empati dalam pengambilan keputusan. Studi oleh Studihadis.com menekankan bahwa pemahaman mengenai pemimpin dalam hadis Nabi dan relevansinya di era politik digital dapat memberikan landasan yang kuat dalam memahami prinsip-prinsip kepemimpinan Islam.

Penelitian oleh (Tamrin, 2023) dalam disertasinya di Universitas PTIQ Jakarta menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara perspektif al-Qur’an mencakup musyawarah (syūrā), keadilan (al-‘adl), persamaan (al-musāwāh), kebebasan (al-ḥurriyyah), dan amanah. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penelitian oleh (Nasrulloh, 2024) menekankan bahwa prinsip-prinsip etika dalam hadis Nabi, seperti amar ma’ruf nahi munkar, tabayyun (klarifikasi), dan menjaga kehormatan orang lain, memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan etika di era digital. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk perilaku bermedia sosial yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tuntunan Islam. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana nilai-nilai etika dalam hadis Nabi dapat diterapkan dalam konteks media sosial di era digital, yang mencerminkan kepedulian dan empati dalam berinteraksi dengan sesama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep kepemimpinan politik dalam Ummul Hadis dengan menelusuri nilai-nilai yang diteladankan Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinannya, seperti keikhlasan, keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan keteladanan moral. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis tematik terhadap narasi-narasi hadis serta sirah nabawiyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep kepemimpinan Islam yang relevan di era kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai profetik tetap menjadi landasan yang kokoh dalam membangun kepemimpinan politik yang berintegritas.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Dalam Islam, kepemimpinan (al-imāmah) dipandang sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan umat. Kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral. Al-Qur'an menekankan bahwa pemimpin harus memiliki sifat adil, bijaksana, dan bertanggung jawab (Winda Febriana, 2024). Dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT menyatakan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi, yang menuntut setiap individu untuk memimpin dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan amanah. Selain itu, Hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh konkret mengenai kepemimpinan yang baik, seperti dalam pengelolaan urusan masyarakat dan pendidikan. Nabi bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya hubungan antara agama dan kekuasaan dalam konteks kepemimpinan. Dalam karyanya *Al-Iqtishād fi al-I'tiqād*, beliau menyatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar; agama adalah pondasi, dan kekuasaan adalah penjaganya. Tanpa pondasi, kekuasaan akan runtuh, dan tanpa penjaga, agama akan hilang. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan harus didasarkan pada nilai-nilai agama untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan umat. Kepemimpinan yang ideal menurut Al-Ghazali adalah yang mampu menjembatani kepentingan spiritual dan kekuasaan duniawi dengan pendekatan simbiotik (Humairah, 2024).

Dengan demikian, konsep kepemimpinan dalam Islam menekankan bahwa pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam mengelola urusan umat. Kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan moral dapat menjadi solusi atas krisis kepemimpinan yang sering terjadi akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits agar dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Fazillah, 2023).

### 2.2 Teori Kepemimpinan Politik dalam Islam

Kepemimpinan politik dalam Islam merupakan institusi penting yang bertujuan menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa kepemimpinan atau imāmah adalah posisi yang mengatur urusan agama dan dunia dengan syariat sebagai landasan utama. Seorang pemimpin dalam pandangan Islam tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan, tetapi juga bertindak sebagai pelindung nilai-nilai agama. Oleh karena itu, jabatan kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan politik, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT (Mawardi, 2020).

Prinsip utama dalam kepemimpinan politik Islam meliputi keadilan (al-'adl), musyawarah (shūrā), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena tanpa keadilan, negara akan runtuh. Selain itu, musyawarah menjadi mekanisme penting dalam pengambilan keputusan, untuk memastikan bahwa pemimpin mendengar aspirasi rakyatnya. Kepemimpinan politik yang ideal juga harus selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yakni menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), akal (*hifẓ al-'aql*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Hal ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam tidak terlepas dari tanggung jawab etis dan spiritual (Salimah, 2023).

Konsep niat dalam hadis Ummul Hadis menjadi fondasi etis dan moral dalam membentuk kepemimpinan politik yang ideal menurut Islam. Seorang pemimpin yang niatnya benar akan menjalankan amanah dengan keadilan dan integritas, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Hal ini memperkuat pemikiran Al-Mawardi bahwa pemimpin harus menjadikan agama sebagai dasar kebijakannya, dan menjadikan kepentingan umat sebagai orientasi utama. Dengan menganalisis hadis Ummul Hadis, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Nabi tidak hanya mencerminkan

spiritualitas pribadi, tetapi juga membentuk struktur kepemimpinan politik yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial.

### 2.3 Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan dalam kepemimpinan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Ahzab [33]:21,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ آخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...*”

Beliau berhasil memimpin masyarakat multikultural di Madinah dengan pendekatan musyawarah, keadilan, welas asih, dan keberanian mengambil risiko demi kemaslahatan umat. Peran beliau tidak terbatas pada ruang spiritual, namun merambah ke ranah politik, sosial, militer, dan hukum. Kepemimpinan beliau ditandai dengan integritas, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, yang berkontribusi pada stabilitas dan keadilan di Madinah.

Salah satu aspek utama dari kepemimpinan Nabi adalah penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Beliau melibatkan para sahabat dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah (Muhammad Nur'ain, 2023). Sebagai contoh, dalam Perang Khandaq, Nabi meminta saran dari sahabatnya, Salman al-Farisi, yang kemudian mengusulkan taktik menggali parit untuk menghadapi serangan pasukan Quraisy. Nabi Muhammad dengan rendah hati menerima ide tersebut yang akhirnya membawa kemenangan bagi umat Islam.

Keadilan juga menjadi pilar utama dalam kepemimpinan Nabi. Beliau selalu menegakkan hukum dengan tegas dan tidak memihak, bahkan terhadap orang-orang terdekatnya (Usman Hamid Sayfulloh, 2024). Contohnya, ketika seorang wanita dari suku Bani Makhzum terbukti mencuri dan beberapa pemuka suku meminta Nabi untuk meringankan hukumannya, beliau menolak permintaan itu dan menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dibedakan berdasarkan status sosial seseorang.

### 2.4 Makna Hadis Ummul Hadis dalam Perspektif Kepemimpinan

Hadis “*innamal a'malu binniyat*” (Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya) yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menjadi dasar utama dalam memahami setiap tindakan, termasuk dalam kepemimpinan politik. Hadis ini menegaskan bahwa niat yang tulus dan ikhlas adalah fondasi keabsahan dan keberkahan suatu perbuatan. Dalam konteks kepemimpinan, niat yang bersih untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi prasyarat mutlak agar setiap kebijakan dan tindakan seorang pemimpin mendapat keberkahan dan dukungan moral dari masyarakat maupun dari Allah SWT.

Niat yang lurus menurut hadis ini juga berfungsi sebagai penuntun moral yang membedakan antara pemimpin yang bertindak demi kepentingan pribadi dan pemimpin yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi untuk memimpin dengan amanah. Dalam kepemimpinan politik Islam, pemimpin yang berpegang pada niat ikhlas akan selalu berusaha menjadikan kebijakan publik sebagai sarana kemaslahatan umat, sesuai dengan maqasid syariah yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rakyat. Oleh karena itu, hadis ini mengajak para pemimpin untuk selalu introspeksi dan memastikan niat mereka benar-benar untuk kebaikan umat, bukan hanya sekadar popularitas atau kekuasaan semata.

Lebih jauh, hadis Ummul Hadis juga memberikan landasan etis yang kuat dalam teori kepemimpinan politik Islam yang mengedepankan keadilan dan amanah sebagai nilai utama. Pemimpin yang didasari niat ikhlas diyakini akan mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian kepemimpinan, sehingga kepemimpinan menjadi efektif dan legitimasi politiknya terjaga. Penelitian oleh (Muhid, 2021) menyatakan bahwa penerapan nilai niat ikhlas dalam kepemimpinan politik meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan meminimalisir praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

## 2.5 Relevansi Kepemimpinan Nabi dalam Konteks Kontemporer

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tetap relevan dalam konteks kepemimpinan modern. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab yang beliau terapkan dapat diadopsi dalam sistem pemerintahan demokratis saat ini. Sebagai contoh, Rasulullah SAW selalu melibatkan para sahabat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, sebagaimana tercermin dalam Q.S. Asy-Syura: 38. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam kepemimpinan yang efektif.

Selain itu, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW juga menekankan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang jujur (*shiddiq*), amanah, menyampaikan kebenaran (*tabligh*), dan bijaksana (*fathanah*). Nilai-nilai ini sangat penting dalam menghadapi krisis kepemimpinan yang sering terjadi akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan meneladani sifat-sifat tersebut, pemimpin modern dapat membangun kepercayaan dan integritas dalam kepemimpinannya.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin masyarakat yang multikultural di Madinah juga memberikan pelajaran berharga dalam konteks keberagaman saat ini. Beliau berhasil menyatukan berbagai suku dan agama melalui Piagam Madinah yang menjamin hak dan kewajiban semua pihak. Pendekatan inklusif dan adil ini relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern yang pluralistik, guna menciptakan harmoni dan keadilan sosial.

## 3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis teks-teks hadis, khususnya Hadis Ummul Hadis “*innamal a'malu binniyat*” serta literatur-literatur keislaman dan kepemimpinan politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari perspektif hadis secara mendalam dan kontekstual.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer berupa kitab hadis seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, serta literatur Islam seperti *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi dan kitab-kitab tafsir dan syarah hadis. Sumber sekunder mencakup buku-buku kepemimpinan Islam modern, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi teks.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema nilai kepemimpinan dalam hadis, seperti keikhlasan, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan musyawarah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan tematik dalam memahami korelasi antara nilai-nilai kepemimpinan Nabi dengan prinsip-prinsip kepemimpinan politik dalam Islam. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali esensi kepemimpinan Nabi SAW yang dapat dijadikan model dalam praktik kepemimpinan kontemporer.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), menelaah Hadis Ummul Hadis: “*Innamal a'malu binniyat...*” (HR. Bukhari dan Muslim) sebagai fondasi etika dalam kepemimpinan politik Islam. Hadis ini menekankan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam konteks kepemimpinan, bergantung pada niatnya. Dalam ilmu politik Islam, niat (*niyyah*) bukan sekadar aspek spiritual, tetapi menjadi instrumen politik yang mengarahkan tujuan kekuasaan. Pemimpin yang berlandaskan niat karena Allah akan mengarahkan seluruh kebijakan dan keputusannya demi kemaslahatan umat, bukan demi kepentingan pribadi atau golongan.

Analisis terhadap hadis ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat. Beliau memimpin dengan keikhlasan, keadilan, musyawarah, dan

tanggung jawab. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai aspek kepemimpinan beliau, seperti dalam Piagam Madinah yang menjamin hak dan kewajiban semua pihak, serta dalam prinsip-prinsip musyawarah yang beliau terapkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kepemimpinan modern.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Hadis Ummul Hadis sebagai Landasan Etika Kepemimpinan

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “*Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya...*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini merupakan salah satu hadis paling fundamental dalam Islam. Ulama hadis seperti Imam Syafi'i bahkan menyebutnya sebagai sepertiga dari ajaran Islam karena relevansinya yang sangat luas, tidak hanya dalam ranah ibadah individual, tetapi juga dalam interaksi sosial, muamalah, bahkan dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. Hadis ini dikenal sebagai Ummul Hadis, karena kedudukannya yang menjadi dasar utama dari semua amal (Ad-Dumaiji, 2021).

Dalam konteks kepemimpinan, terutama kepemimpinan politik, niat merupakan fondasi utama yang menentukan arah, motivasi, dan kualitas dari tindakan-tindakan seorang pemimpin. Niat yang lurus dan ikhlas menjadi ukuran awal dari keabsahan amal dan kebijakan seorang pemimpin dalam pandangan Islam. Kepemimpinan yang didasari oleh niat untuk mengabdikan kepada Allah dan membawa kemaslahatan bagi rakyat akan menghasilkan tindakan yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab.

Sebaliknya, jika niat seorang pemimpin didasarkan pada kepentingan pribadi, ambisi kekuasaan, atau mencari popularitas, maka seluruh kebijakannya akan tercemari oleh kepentingan sempit dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Hadis ini dengan tegas mengingatkan bahwa nilai amal bukan terletak pada bentuk luar atau keberhasilannya secara duniawi, tetapi pada apa yang melatarbelakanginya yakni niat.

Rasulullah SAW telah memberikan teladan nyata bahwa niat yang benar akan membuahkan hasil yang barokah. Beliau menolak segala bentuk kekuasaan dan kedudukan yang ditawarkan Quraisy apabila harus mengorbankan kebenaran dan prinsip dakwah. Nabi memimpin bukan untuk menguasai, tetapi untuk membimbing dan menyelamatkan umat manusia. Niat Nabi dalam memimpin selalu berorientasi pada *li i'lai kalimatillah* (meninggikan kalimat Allah), bukan semata keuntungan politik (Irka Mulianty, 2024).

Dalam struktur kepemimpinan modern, etika dan integritas menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi. Namun, Islam jauh lebih awal telah menetapkan standar ini melalui prinsip niat. Seorang pemimpin yang memiliki niat tulus akan lebih terbuka pada kritik, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih fokus pada kebaikan umat, bukan sekadar pencapaian pribadi.

### 4.2.2 Nilai-Nilai Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak hanya bersifat administratif atau struktural, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai ilahiah yang mencerminkan ajaran Islam secara menyeluruh. Sebagai utusan Allah dan pemimpin umat, Rasulullah SAW menampilkan karakter kepemimpinan yang utuh dan ideal, yang mampu menjadi rujukan dalam semua zaman. Nilai-nilai utama dalam kepemimpinan beliau meliputi ikhlas, tanggung jawab, keadilan, dan keteladanan, yang semuanya berpijak pada ketakwaan dan niat suci untuk menegakkan kebenaran.

#### a. Ikhlas (Ikhlasiyah)

Ikhlas merupakan fondasi spiritual dalam kepemimpinan Nabi. Segala tindakan beliau selalu diniatkan untuk mengharap ridha Allah SWT semata, bukan untuk kepentingan pribadi, popularitas, atau kekuasaan

duniawi. Ketika Quraisy menawarkan kekayaan, kedudukan, dan wanita kepada Nabi dengan syarat menghentikan dakwahnya, beliau dengan tegas menolak dan berkata:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُثَيْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ الْأَخْنَسِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ فُرَيْشًا حِينَ قَالَتْ لِأَبِي طَالِبٍ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَاءُونِي ، فَقَالُوا لِي : كَذَا وَكَذَا ، فَأَبِئْ عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ ، وَلَا تُحْمِلْنِي مَا لَا أُطِيقُ ، فَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ بَدَأَ لِعَمِّهِ فِيهِ بَدَاءً ، وَأَنَّهُ خَاذِلُهُ وَمُسْلِمُهُ ، وَأَنَّهُ ضَعْفَ عَنْ نُصْرَتِهِ وَالْقِيَامَ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ يَا عَمِّ ، لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي ، وَالْقَمَرَ فِي شِمَالِي ، عَلَى أَنْ أَنْزِكَ هَذَا الْأَمْرَ مَا تَرَكْتُهُ ، حَتَّى يُظَاهِرَهُ اللَّهُ ، أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ ، ثُمَّ اسْتَعْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَكَى ، ثُمَّ قَامَ ، فَلَمَّا وُلَّى نَادَاهُ أَبُو طَالِبٍ ، فَقَالَ : أَقْبِلْ يَا ابْنَ أَخِي ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اذْهَبْ يَا ابْنَ أَخِي فَافْعَلْ مَا أَحْبَبْتَ ، فَوَاللَّهِ لَا أُسَلِّمُكَ لِشَيْءٍ أَبَدًا ”

Artinya: “Wahai Paman, Demi Allah, sekalipun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini (penyampaian risalah) sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan aku meninggalkannya..”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memiliki ambisi duniawi dalam memimpin, melainkan menjadikan kekuasaan sebagai sarana ibadah dan dakwah. Ikhlas dalam kepemimpinan bukan hanya terkait niat awal, tetapi juga konsistensi dalam menjaga kemurnian tujuan di tengah godaan kekuasaan. Nabi tidak pernah menggunakan kedudukannya untuk memperkaya diri atau membalas dendam, justru beliau menjadi pelindung bagi yang lemah dan penjaga keadilan bagi semua.

#### **b. Tanggung Jawab (Mas’uliyah)**

Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW menyadari hal ini dan memimpin umat dengan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari upaya beliau menyusun Piagam Madinah, yang menjadi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban seluruh warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, serta menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kedamaian dan keamanan kota.

Nabi juga memperhatikan kesejahteraan umat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan. Beliau turun langsung ke medan perang saat dibutuhkan, mendengarkan keluhan rakyatnya, dan membagikan harta rampasan perang secara adil. Kepemimpinan Nabi bukan hanya simbolis, melainkan penuh keterlibatan aktif dan komitmen terhadap umat.

#### **c. Keadilan (‘Adalah)**

Salah satu nilai paling menonjol dalam kepemimpinan Rasulullah adalah keadilannya. Nabi tidak pernah membedakan manusia berdasarkan status sosial, keturunan, atau agama. Keputusan beliau selalu didasarkan pada kebenaran dan bukti yang jelas. Sikap adil Nabi ini memperkuat legitimasi kepemimpinannya di mata umat, karena mereka melihat bahwa pemimpinnya tidak memihak atau zalim. Keadilan beliau juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya, seperti pembagian zakat, ghanimah, dan dalam mediasi konflik antar suku. Tidak ada yang merasa dizalimi atau diabaikan di bawah kepemimpinan beliau.

#### **d. Teladan (Uswah Hasanah)**

Allah SWT menyebut Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah (teladan yang baik) dalam QS. Al-Ahzab: 21. Keteladanan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan politik. Nabi

menunjukkan akhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan sahabat, musuh, dan masyarakat luas. Beliau memimpin dengan kasih sayang, kesabaran, dan strategi yang bijaksana.

Dalam hal komunikasi politik, Nabi menunjukkan kepiawaian berdiplomasi, seperti dalam Perjanjian Hudaibiyah yang walaupun tampak merugikan di awal, namun memberikan dampak positif besar dalam jangka panjang. Dalam manajemen konflik, Nabi menggunakan pendekatan damai dan bijak, sering kali meredakan ketegangan tanpa kekerasan. Beliau tidak hanya menyuruh umat untuk berbuat baik, tetapi terlebih dahulu memberikan contoh dalam tindakannya (Kholis, 2022).

Nilai-nilai ini menjadikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bukan hanya berhasil secara politik dan sosial, tetapi juga spiritual dan peradaban. Kepemimpinan yang meneladani Rasulullah akan selalu relevan sepanjang zaman, karena mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan cinta kepada umat. Jika diterapkan oleh para pemimpin masa kini, maka akan lahir masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkemajuan.

#### **4.2.3 Implementasi Hadis dalam Kepemimpinan Politik Nabi**

Hadis "*innamal a'malu binniyat*" (Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya) tidak hanya menjadi prinsip spiritual dalam Islam, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam tindakan politik Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks kepemimpinan politik, hadis ini bukan hanya berkaitan dengan niat secara internal, tetapi menjadi prinsip operasional yang membimbing arah dan tujuan dari setiap kebijakan serta langkah strategis yang diambil Nabi. Implementasi hadis ini dalam kepemimpinan politik beliau tercermin dengan sangat jelas dalam berbagai peristiwa penting, salah satunya adalah Perjanjian Hudaibiyah.

##### **a. Perjanjian Hudaibiyah: Politik Berbasis Niat dan Hikmah**

Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah, ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Namun, kaum Quraisy menghalangi mereka masuk ke kota. Akhirnya, terjadi perundingan dan disepakatilah perjanjian damai antara kaum Muslimin dan Quraisy. Isi perjanjian ini secara kasat mata tampak merugikan pihak Muslim, antara lain: tidak boleh umrah tahun itu, harus kembali ke Madinah, dan harus mengembalikan siapa pun yang datang dari Makkah ke Madinah, tetapi tidak berlaku sebaliknya (Diana, 2021).

Banyak sahabat, termasuk Umar bin Khattab, merasa keberatan dengan isi perjanjian ini karena dianggap tidak adil. Namun, Nabi tetap teguh dengan niat awal beliau yakni mencari jalan damai dan membuka ruang dakwah yang lebih luas. Dalam peristiwa ini, niat Nabi bukan semata-mata mengalah untuk kepentingan sesaat, tetapi menempatkan hikmah (kebijaksanaan) dan visi jangka panjang sebagai pertimbangan utama dalam kebijakan politik.

Hasilnya, dalam dua tahun setelah perjanjian, Islam menyebar jauh lebih luas daripada sebelumnya. Banyak kepala suku yang memeluk Islam, kaum Quraisy melemah, dan akhirnya Perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh pihak Quraisy sendiri. Pelanggaran ini justru membuka jalan bagi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang berlangsung damai dan tanpa pertumpahan darah.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa niat baik yang dilandasi keikhlasan dan visi ke depan dapat menjadi strategi politik yang kuat dan efektif, meskipun awalnya tampak sebagai kelemahan. Inilah bukti bahwa Rasulullah SAW menerapkan hadis "*innamal a'malu binniyat*" secara nyata dalam kebijakan politiknya.

##### **b. Kebijakan Politik Nabi: Berorientasi Ibadah dan Kemaslahatan**

Kepemimpinan Nabi dalam bidang politik tidak pernah lepas dari nilai-nilai tauhid dan pengabdian kepada Allah. Nabi tidak pernah memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Semua langkah politiknya berakar dari misi kerasulan: menyebarkan kebenaran dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam

konteks ini, niat menjadi penentu arah. Beliau tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk memperkuat dominasi pribadi atau golongan tertentu, tetapi untuk membangun peradaban yang adil, damai, dan bermartabat.

### c. Niat sebagai Prinsip Strategis dan Etis

Dalam dunia politik, niat sering kali dikesampingkan karena yang dilihat adalah hasil, kekuasaan, dan pengaruh. Namun, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa politik yang tidak dibimbing oleh niat baik dan nilai-nilai spiritual akan kehilangan arah dan legitimasi. Kepemimpinan yang berorientasi pada niat ibadah menciptakan politik yang bersih, jujur, dan membawa keberkahan, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi non-Muslim yang hidup berdampingan dengan kaum Muslimin.

Nabi juga menunjukkan bahwa niat yang benar tidak berarti mengabaikan strategi. Justru, niat yang ikhlas harus didukung oleh strategi cerdas, sebagaimana beliau menyusun strategi diplomasi, aliansi suku, intelijen militer, dan negosiasi politik dengan penuh perhitungan. Namun, semua itu tetap bermuara pada tujuan mulia, menegakkan kalimat Allah dan menjaga kemaslahatan umat.

Dengan demikian, implementasi hadis Ummul Hadis dalam kepemimpinan politik Nabi bukan hanya sebagai nilai personal, tetapi menjadi prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi perang, perjanjian diplomatik, hingga sistem pemerintahan. Nabi mengajarkan bahwa keberhasilan sejati dalam politik bukanlah kemenangan sesaat, melainkan hasil jangka panjang yang diridhai Allah dan membawa maslahat luas bagi seluruh umat manusia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Hadis Ummul Hadis: “*Innamal a‘mālu binniyāt...*” (HR. Bukhari dan Muslim) bukan hanya merupakan dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amal perbuatan dalam Islam, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam konsep kepemimpinan politik. Dalam konteks ini, hadis tersebut menegaskan bahwa niat adalah pondasi utama dalam setiap tindakan politik, termasuk dalam kepemimpinan.

Nilai-nilai kepemimpinan yang diteladankan Nabi Muhammad SAW, seperti keikhlasan, keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab, menunjukkan model kepemimpinan yang ideal. Kepemimpinan Nabi tidak hanya sukses dalam ranah spiritual, tetapi juga dalam pemerintahan, sosial, dan militer. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki sistem kepemimpinan politik yang tidak hanya berbasis legal-formal, tetapi juga berbasis etika dan spiritualitas.

Dalam perspektif ilmu politik kontemporer, nilai-nilai tersebut tetap relevan, terutama dalam menjawab tantangan krisis moral dan korupsi dalam sistem politik modern. Kepemimpinan yang dilandasi pada nilai-nilai profetik sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi solusi alternatif terhadap sistem politik yang sering kali kehilangan arah dan tujuan moralnya.

### Saran

Disarankan agar para pemimpin Muslim di era modern menjadikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dalam menjalankan amanah kepemimpinan, dengan menanamkan niat yang tulus dan mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan, khususnya hadis-hadis etis seperti Ummul Hadis, perlu terus digali dalam perspektif ilmu politik Islam agar memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan konsep kepemimpinan Islami. Diharapkan konsep kepemimpinan profetik dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan politik dan keislaman, agar generasi muda memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang kekuasaan, melainkan juga tentang amanah dan tanggung jawab moral yang besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Ad-Dumaiji, A. (2021). *Konsep Kepemimpinan dalam Islam (Al-Imamah Al-'Uzma)*. Jakarta: Ummul Qura.
- [2] Diana, I. N. (2021). *Kepemimpinan Islami*. Malang: UIN-Maliki Press.
- [3] Fazillah, N. (2023). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Journal of Education Sciences and Teacher Training* , Vol. 12. No. 1, 112-134.
- [4] Humairah, U. (2024). Dasar Kepemimpinan Pendidikan Agama Islam Dalam Al- Qur'an dan Hadits. *IMAMAH: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* , Volume 2, Nomor 1 .
- [5] Irka Muliyanthy, d. (2024). Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan. *Journal on Educatio* , Volume 06, No. 04.
- [6] Kholis. (2022). Memahami Hadis Tentang Kepemimpinan Laki-Laki atas Perempuan dalam Konteks Ke-Indonesiaan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* , Vol. 7, No. 1.
- [7] Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- [8] Muhammad Nur'ain, d. (2023). Kepemimpinan Rasulullah SAW. *edu-Leadership* , Volume 3, Nomor 1, Februari – Juli.
- [9] Muhid, d. (2021). *Konsep Kepemimpinan Modern Perspektif Hadis Nabi*. Lamongan: Academia Publication.
- [10] Nasrulloh, T. D. (2024). Relevansi Hadits Nabi dalam Menanggapi Tantangan Etika Media Sosial di Era Digital. *Holistik Analisis Nexus* , 1(12):125-132, DOI: 10.62504/nexus1087.
- [11] Salimah, d. (2023). Analisis Konsep Model Kepemimpinan Profetik (Nabi Muhammad SAW) dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* , Volume 6 Nomor 4.
- [12] Tamrin, A. (2023). *Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Jakarta: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta.
- [13] Usman Hamid Sayfullah, d. (2024). Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan dan Pemerintahan Islami, *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* , Vol 3 No 2, DOI: <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i2.3598>.
- [14] Wahdah, H. A. (2023). Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW: Analisis Nilai Politik Hukum. *Jentera Hukum Borneo* , 6(2), 40–53. Diambil dari <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/janterera/article/view/595>.
- [15] Winda Febriana, d. (2024). Meneladani Gaya Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* , Volume 4, Nomor 2.